

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1. KAJIAN TEORI

2.1.1. Audit

A. Definisi Audit

Audit merupakan sebuah proses yang sistematis dan objektif untuk mengumpulkan serta mengevaluasi bukti secara kritis terkait asersi atau pernyataan manajemen tentang peristiwa dan transaksi ekonomi. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, lalu menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan (Halim, 2018).

Senada dengan pandangan tersebut, Arens, Elder, dan Beasley (2017) mendefinisikan audit sebagai proses akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Proses ini harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi memadai dan bersifat independen, agar hasilnya bebas dari bias dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), audit adalah pemeriksaan sistematis dan independen atas laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya, dengan tujuan menilai kewajarannya berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam konteks penelitian ini, audit secara spesifik mengacu pada pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen pada suatu entitas. Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah laporan tersebut telah disusun dan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

B. Tujuan Audit

Tujuan utama audit laporan keuangan adalah meningkatkan tingkat keyakinan pengguna atas informasi yang disajikan, melalui evaluasi profesional terhadap kewajaran penyajian.

Secara lebih rinci, tujuan audit dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Auditor bertugas menyatakan opini apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia atau International Financial Reporting Standards (IFRS) secara internasional (ISA 200; SA 200).
2. Mengidentifikasi salah saji material. Audit dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik akibat kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, auditor bertanggung jawab merancang dan melaksanakan prosedur yang efektif untuk mendeteksi risiko salah saji material (ISA 200).
3. Meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh auditor independen membuat laporan keuangan lebih terpercaya di mata para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, regulator, dan pihak eksternal lainnya, karena telah melalui proses verifikasi objektif.
4. Menjamin keandalan informasi keuangan. Audit juga memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan akurat, relevan, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemangku kepentingan.
5. Mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Selain aspek pelaporan, audit juga berfungsi untuk menilai sejauh mana entitas mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam aspek pelaporan keuangan maupun pengendalian internal (ISA 250; ISA 265).

C. Karakteristik Audit

Agar audit dapat mencapai tujuannya secara efektif, proses audit laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Independen. Audit harus dilakukan oleh auditor yang bebas dari pengaruh pihak mana pun, baik dari manajemen entitas yang diaudit maupun pihak berkepentingan lainnya, guna menjamin objektivitas pemberian opini (ISA 200).
2. Objektif. Auditor dituntut bersikap profesional dan tidak memihak, serta mendasarkan kesimpulannya pada bukti audit yang diperoleh selama

pemeriksaan, bukan asumsi atau tekanan pihak lain (Arens, Elder, & Beasley, 2017).

3. Sistematis dan Terstruktur. Proses audit dilakukan berdasarkan standar yang berlaku dan melalui tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan prosedur audit, hingga pelaporan hasil pemeriksaan (ISA 300).
4. Berdasarkan Bukti Audit yang Memadai dan Kompeten. Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup (*sufficiency*) dan tepat (*appropriateness*) untuk mendukung opini yang diberikan. Bukti audit diperoleh melalui berbagai cara, termasuk pengujian transaksi, prosedur analitis, konfirmasi eksternal, wawancara, dan metode audit lainnya (ISA 500).
5. Mengikuti Standar Audit yang Berlaku. Audit dilakukan sesuai dengan standar profesional audit, baik yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI) maupun standar internasional lainnya yang relevan, untuk menjamin mutu dan konsistensi hasil audit.
6. Bersifat Profesional dan Etis. Auditor wajib mematuhi kode etik profesi, seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kecermatan, kerahasiaan, dan perilaku profesional (*due professional care*), dalam seluruh pelaksanaan tugas auditnya.

D. Standar Audit

Standar audit adalah pedoman yang digunakan oleh auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan entitas. Standar-standar ini menjadi pedoman profesional bagi auditor agar seluruh proses audit berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan mutu audit yang tinggi.

Di Indonesia, auditor publik wajib menerapkan SPAP yang diterbitkan IAPI sebagai pedoman praktik profesional, sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut IAI (2017), SPAP mencakup beberapa pedoman penting, antara lain Standar Audit (SA), Standar Atestasi (SAE), Standar Jasa Lainnya (SJL), dan Kode Etik Akuntan Publik. SA menjadi acuan utama dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, sedangkan SAE dan SJL digunakan untuk jasa atestasi non-audit serta layanan non-assurance lainnya. Kode Etik

berfungsi mengarahkan perilaku profesional auditor agar tetap independen dan objektif selama proses audit berlangsung.

Mulyadi (2017) membagi standar audit menjadi tiga kelompok utama: (1) Standar Umum yang menekankan kompetensi dan independensi auditor, (2) Standar Pekerjaan Lapangan terkait perencanaan audit dan pengumpulan bukti yang memadai, serta (3) Standar Pelaporan yang mengatur penyusunan dan isi laporan audit.

2.1.2. Aset Tetap

A. Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PSAK 16 (Revisi 2015), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk penggunaan jangka panjang, baik dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, disewakan kepada pihak lain, maupun untuk keperluan administratif, dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap umumnya diklasifikasikan berdasarkan fungsi atau jenisnya, seperti tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, serta perabot dan peralatan kantor.

B. Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset tetap dapat diakui dalam laporan keuangan jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pengukuran awal aset tetap dilakukan sebesar biaya perolehan (*cost*), yang meliputi harga beli (termasuk bea masuk dan pajak tidak dikreditkan); biaya langsung yang dapat diatribusikan (misalnya, biaya pengangkutan, instalasi, dan uji coba); estimasi awal biaya pembongkaran dan pemulihan lokasi.

C. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Setelah suatu aset diakui dalam laporan keuangan, entitas perlu menentukan metode pengukuran yang akan digunakan secara konsisten sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. PSAK 16, yang selaras dengan ketentuan IAS 16, memberikan dua alternatif model pengukuran, yaitu Model Biaya (*Cost Model*) dan Model Revaluasi (*Revaluation Model*).

Dalam Model Biaya, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya, yang mencakup harga pembelian, biaya langsung yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan, serta estimasi biaya pembongkaran atau pemulihan lokasi jika ada kewajiban tersebut. Nilai tersebut kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika terdapat indikasi bahwa nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan (*recoverable amount*). Model ini dianggap lebih sederhana dan memberikan stabilitas nilai aset dalam laporan keuangan, tetapi berpotensi mengabaikan perubahan nilai pasar yang signifikan.

Sementara itu, Model Revaluasi menetapkan bahwa aset tetap dicatat berdasarkan nilai wajar (*fair value*) pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai setelah revaluasi tersebut. Penentuan nilai wajar umumnya memerlukan penilaian profesional (*appraisal*) yang independen. Revaluasi harus dilakukan berkala untuk memastikan bahwa nilai tercatat tidak berbeda secara material dari nilai wajarnya. Jika nilai aset meningkat akibat revaluasi, selisihnya diakui sebagai surplus revaluasi pada ekuitas, kecuali untuk penurunan nilai sebelumnya yang diakui di laba rugi.

Pemilihan antara kedua model ini memiliki implikasi terhadap penyajian laporan keuangan, analisis kinerja, serta rasio keuangan entitas. Oleh karena itu, kebijakan pengukuran setelah pengakuan awal harus dipertimbangkan dengan cermat, memerhatikan karakteristik aset, kondisi pasar, dan tujuan pelaporan keuangan.

D. Penyusutan Aset Tetap

Sesuai PSAK 16, semua aset tetap (kecuali tanah dengan umur manfaat tidak terbatas) harus disusutkan selama umur manfaat ekonominya. Penyusutan dimulai saat aset siap digunakan.

Komponen penting dalam perhitungan penyusutan:

- a. Metode: Dapat menggunakan metode garis lurus (*straight-line*), saldo menurun ganda, atau unit produksi. Pilihan metode harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi aset.
- b. Umur manfaat: Estimasi periode penggunaan aset.

- c. Nilai residu: Estimasi nilai yang akan diperoleh pada akhir masa manfaat. Estimasi wajib meninjau ulang umur manfaat, metode penyusutan, dan nilai residu minimal setiap akhir tahun buku. (PSAK 16).

E. Penghapusan dan Disposisi Aset

Penghentian pengakuan (*disposisi*) atas aset tetap terjadi jika aset tersebut dilepaskan atau dijual, atau tidak ada lagi manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap diakui dalam laba rugi periode berjalan. Perlakuan akuntansi atas disposisi mencakup:

- a. Menghapus nilai tercatat aset dari pembukuan;
- b. Mengakui hasil pelepasan/ penjualan (jika ada); dan
- c. Mengakui selisihnya sebagai keuntungan atau kerugian.

2.1.3. Prosedur Audit Aset Tetap

Audit terhadap akun aset tetap adalah aspek penting dalam proses audit laporan keuangan karena sifatnya yang material dan berdampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan. Tujuan utama dari audit aset tetap adalah untuk memastikan kewajaran saldo akun melalui pengujian terhadap beberapa asersi, seperti keberadaan (*existence*), hak dan kewajiban (*rights and obligations*), kelengkapan (*completeness*), penilaian (*valuation*), serta penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*) (Arens et al., 2017).

Salah satu tujuan spesifik dalam audit aset tetap adalah mengevaluasi ketepatan saldo akhir akun aset tetap, memastikan eksistensi aset tersebut, serta memverifikasi kepemilikan hukum entitas terhadap aset yang dicatat. Hal ini krusial karena untuk mencegah kesalahan material dan menilai apakah aset digunakan sesuai fungsinya (Elder et al., 2019).

Pengujian pengendalian (*test of controls*) merupakan langkah awal yang dilakukan auditor untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan terkait aset tetap. Pengendalian internal tersebut mencakup kebijakan perolehan aset, prosedur otorisasi pembelian, pencatatan akuntansi yang tepat, serta pemantauan pemeliharaan fisik aset. Auditor akan mengevaluasi apakah seluruh

proses ini tercatat dengan baik dan sesuai dengan kebijakan perusahaan (Boynton & Johnson, 2006).

Setelah melakukan pengujian pengendalian, auditor melanjutkan ke tahap prosedur substantif, yaitu melakukan inspeksi langsung terhadap aset tetap untuk memastikan eksistensi dan kondisi fisiknya. Selain itu, auditor dapat meminta konfirmasi kepada pihak ketiga seperti *vendor* atau pihak *appraisal* untuk memastikan keabsahan kepemilikan atau menilai kewajaran nilai aset (Sawyer, 2010). Rekonsiliasi antara buku besar dengan daftar aset tetap juga menjadi bagian penting dalam prosedur substantif, untuk memastikan tidak adanya selisih atau kesalahan pencatatan atas aset yang dimiliki perusahaan (Messier et al., 2018).

Auditor juga perlu melakukan pengujian terhadap penyusutan yang dibebankan perusahaan, termasuk mengevaluasi metode yang digunakan, masa manfaat aset, nilai residu, serta konsistensinya dengan kebijakan akuntansi perusahaan dan ketentuan dalam PSAK 16 mengenai Aset Tetap. Auditor melakukan perhitungan ulang terhadap penyusutan dan membandingkannya dengan perhitungan dari klien untuk memastikan tidak terjadi *overstatement* atau *understatement* terhadap beban penyusutan (Kieso et al., 2019).

Dalam situasi di mana dokumen pendukung, seperti faktur atau berita acara serah terima, tidak tersedia (khususnya untuk aset yang diperoleh di masa lampau), auditor dapat menggunakan prosedur audit alternatif. Prosedur ini melibatkan observasi langsung terhadap aset yang bersangkutan atau memanfaatkan jasa penilai independen (*appraiser*) untuk menilai nilai wajar aset. Pendekatan ini dilakukan untuk tetap memperoleh bukti audit yang cukup dan relevan guna mendukung opini auditor terhadap laporan keuangan (Hayes et al., 2014). Dengan melaksanakan seluruh prosedur tersebut secara sistematis, auditor dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa akun aset tetap telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2.1.4. Laporan Keuangan Terkait Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen penting dalam laporan keuangan, terutama dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Pada laporan tersebut, aset tetap

dicatat berdasarkan biaya perolehannya setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai (*impairment*), jika ada. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk menggambarkan secara akurat nilai tercatat atau nilai buku (*carrying amount*) aset tetap yang masih digunakan dalam operasional entitas (Kieso et al., 2019).

Penyajian aset tetap yang akurat dalam neraca melibatkan dua unsur utama, yaitu biaya perolehan awal dan akumulasi penyusutan. Auditor akan menilai kedua unsur tersebut untuk memastikan bahwa pencatatan dan pelaporannya telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan aset tetap yang tidak lagi digunakan atau sudah tidak memberikan manfaat ekonomi, yang seharusnya dihapus dari pembukuan atau disesuaikan nilainya (Arens et al., 2017).

Selain dalam laporan posisi keuangan, informasi penting mengenai aset tetap juga wajib diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK menyediakan detail tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyusutan aset tetap. Informasi ini meliputi metode penyusutan (misalnya garis lurus atau saldo menurun ganda), estimasi umur manfaat ekonomi, nilai residu, serta adanya perubahan kebijakan atau estimasi akuntansi (Elder et al., 2019).

Pengungkapan di CaLK juga mencakup rincian aset tetap berdasarkan jenisnya, nilai tercatat pada akhir periode, serta informasi mengenai aset yang dijadikan jaminan atau yang sedang dalam tahap konstruksi. Transparansi pengungkapan ini krusial karena membantu pengguna laporan keuangan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan manajemen aset tetap perusahaan (Messier et al., 2018). Dengan demikian, laporan keuangan memegang peranan sentral dalam menyajikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan terkait aset tetap kepada para pemangku kepentingan, serta menjadi dasar penting dalam proses audit aset tetap.

2.2. KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menyajikan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan untuk membangun kerangka teoritis dan mengidentifikasi posisi unik penelitian ini.

Mengkaji literatur sebelumnya adalah langkah penting untuk memahami konteks dan kontribusi penelitian ini dalam bidang audit. Berbagai studi telah mendalami aspek-aspek prosedur audit aset tetap. Beberapa penelitian yang relevan meliputi:

1. Saputra & Syafitri (2020) dalam penelitian ini mengkaji seberapa efektif sistem pengendalian internal terkait aset tetap dan prosedur pemeriksaan aset fisik di lapangan. Peneliti mengidentifikasi proses audit yang diterapkan oleh tim auditor CV. Alif Jaya, termasuk cara menangani perbedaan antara catatan keuangan dan keadaan yang sebenarnya. Temuan ini menekankan betapa pentingnya sebuah sistem dokumentasi yang terstruktur untuk memastikan keandalan bukti audit serta mengurangi risiko kesalahan informasi.
2. Rahayu (2022) penelitian ini membahas aturan auditor menetapkan materialitas spesifik untuk akun aset tetap. Rahayu menjelaskan metode penilaian risiko yang menggabungkan nilai aset, pola penyusutan, dan kemungkinan kesalahan pencatatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan materialitas yang akurat akan membantu auditor untuk lebih fokus dalam melakukan pengujian substantif di area yang paling berisiko, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses audit.
3. Febriani et al. (2021) penelitian ini berfokus pada pemeriksaan dokumen akuisisi dan penyesuaian biaya kapitalisasi sesuai dengan PSAK, serta menganalisis pengaruh jurnal koreksi terhadap laporan keuangan PT ABC. Penelitian ini menunjukkan bahwa keakuratan dalam mencocokkan faktur, bukti pembayaran, dan pengeluaran langsung secara signifikan mampu mengurangi kesalahan dalam pencatatan biaya akuisisi aset tetap.
4. Deswanto (2022) memperkenalkan sebuah model yang menggabungkan ISO 55000 ke dalam proses audit untuk aset tetap dengan menambahkan elemen siklus hidup aset, yang mencakup tahap perencanaan, pembelian, pengoperasian, perawatan, hingga pembuangan, serta pemeriksaan tingkat kematangan, indikator kinerja utama, dan pengelolaan risiko aset. Pendekatan ini mengalihkan perhatian auditor dari hanya memeriksa data historis ke penilaian menyeluruh tentang seberapa efektif pengelolaan aset yang dilakukan, meskipun membutuhkan pelatihan khusus dan penyesuaian pada dokumen kerja audit.

Posisi Penelitian (Gap Analysis)

Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap empat penelitian utama, berikut adalah pemaparan kesenjangan yang menciptakan keunikan serta kontribusi dari penelitian “Prosedur Audit Aset Tetap Studi Kasus di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta”:

Studi dan Fokus	Kekuatan Umum	Kesenjangan
Saputra & Syafitri (2020) menilai efektivitas sistem pengendalian internal serta pemeriksaan fisik aset di CV. Alif Jaya.	Menggarisbawahi pentingnya adanya dokumentasi yang terstruktur dan prosedur lapangan dalam perusahaan swasta kecil.	Tidak membahas prosedur audit dengan mendalam dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Selain itu, analisis mengenai variasi dalam pengadaan dan disposisi aset juga kurang mendetail.
Rahayu (2022) menetapkan materialitas khusus bagi aset tetap.	Menguraikan metode penilaian risiko dan pengaruhnya terhadap pengujian substantif.	Fokusnya terbatas pada masalah materialitas, dengan sedikit perhatian pada pengujian kontrol, penilaian pengendalian internal, atau tindakan alternatif untuk dokumen-dokumen yang tidak lengkap.
Febriani et al. (2021) memeriksa dokumen akuisisi dan penyesuaian biaya untuk kapitalisasi.	Membahas dengan rinci tentang akurasi dalam mencocokkan faktur dan bukti pembayaran serta dampak dari jurnal koreksi terhadap laporan keuangan.	Tidak mengeksplorasi verifikasi fisik aset secara mendalam, penggunaan layanan penilai, dan pengujian dalam penyusutan serta penghapusan aset.
Deswanto (2022)	Memperluas jangkauan	Lebih bersifat konseptual dan

mengintegrasikan ISO 55000 ke dalam prosedur audit aset tetap.	audit untuk mencakup seluruh siklus hidup aset, penilaian kematangan, indikator kerja, dan manajemen risiko dalam pengelolaan aset.	tidak diuji dalam konteks praktik audit nyata di KAP lokal, serta sangat sedikit memberikan gambaran penerapan teknis seperti inspeksi fisik dan dokumentasi kerja audit.
--	---	---

Kesenjangan Umum yang Teridentifikasi:

- Proses Audit *End to End*: Belum ada penelitian empiris yang menguraikan secara menyeluruh langkah-langkah audit aset tetap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan (termasuk pengujian kontrol dan prosedur substantif), hingga pelaporan dalam satu kerangka kerja yang terpadu.
- Variasi Perolehan dan Disposisi Aset: Penelitian sebelumnya kurang membahas dengan tuntas prosedur audit terkait berbagai cara pengadaan aset (seperti tunai, leasing, pertukaran, atau pembangunan sendiri) serta metode audit untuk penghentian atau disposisi aset.
- Prosedur Alternatif dan Peran *Appraiser*: Terdapat kekurangan dalam kajian lapangan terkait bagaimana auditor menangani dokumen pengadaan yang tidak lengkap dan bagaimana kriteria serta proses pemanfaatan jasa penilai independen dalam audit.
- Konteks Praktik KAP Lokal: Sebagian besar penelitian cenderung memusatkan perhatian pada entitas tertentu (seperti CV, PT, institusi publik) dan belum banyak yang mendalami praktik audit aset tetap di lingkungan Kantor Akuntan Publik lokal, seperti KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta.

Implikasi bagi Penelitian ini:

Studi ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan:

- Mendetailkan langkah-langkah audit aset tetap secara menyeluruh dari awal hingga akhir pelaporan.
- Menjelaskan prosedur verifikasi terkait perolehan, perhitungan depresiasi, penghentian aset, dan penggunaan jasa *appraisal*.

- c. Memperlihatkan penerapan prosedur alternatif (misalnya observasi fisik dan konfirmasi) saat berhadapan dengan dokumen yang tidak lengkap.
- d. Menyajikan konteks praktik audit aset tetap dengan fokus yang khusus di KAP Drs. Inaresjz Kemalawarta, sehingga memberikan tambahan referensi pada literatur melalui studi kasus empiris dari KAP lokal.